



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1974

PRESIDEN REPBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukharest Rumania pada tanggal 19 Agustus hingga 30 Agustus 1974.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi Masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukharest Rumania pada tanggal 19 Agustus hingga 30 Agustus 1974.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi kependudukan Dunia 1974 di Bukharest Rumania pada tanggal 19 Agustus hingga 3 Agustus 1974.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK-PETUNJUK PENGARAHAN
BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
KE KOPERENSI KEPENDUDUKAN DUNIA
DI BUKHAREST

I. UMUM

1. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk dunia sangat tinggi sementara usaha-usaha penyebaran penduduk kurang seimbang dan kemampuan untuk menyediakan lapangan kerjapun belum memadai. Kenyataan seperti diatas itu pulalah yang membangkitkan kesadaran kita, bahwa masalah kependudukan perlu segera ditanggulangi bersama oleh seluruh Pemerintah dan Bangsa-bangsa di dunia.
2. Di dalam rangkaian inilah Pemerintah Indonesia berpendirian bahwa Konperensi Kependudukan sedunia yang akan datang dapat memberikan sumbangan kearah tercapainya suatu program kerjasama internasional dibidang kependudukan.
3. Sebagaimana telah digariskan MPR di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Politik Luar Negeri Indonesia harus diabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia, Delegasi Republik Indonesia hendaknya memperhatikan prioritas-prioritas dalam pembangunan Nasional Indonesia serta hasil-hasil yang telah dicapai di forum internasional lainnya dibidang kependudukan dan aspek-aspek yang berhubungan erat dengan masalah Kependudukan tersebut.

II. KHUSUS

Dalam menghadapi beberapa masalah yang mungkin timbul dan dibahas di dalam Konperensi Delegasi Republik Indonesia agar mempergunakan beberapa petunjuk sebagai pedoman dibawah ini :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. MASALAH KEPENDUDUKAN DEWASA INI DAN PROSPEKNYA DIMASA DEPAN (Recent population Trends and future prospects).

- a. Masalah penting yang dihadapi oleh Indonesia dibidang kependudukan adalah:
 - (a) Jumlah penduduk yang besar.
 - (b) Tingkat pertumbuhan yang amat tinggi.
 - (c) Pembagian penduduk yang tidak merata.
 - (d) Komposisi umur penduduk yang kurang menguntungkan.
 - (e) Mobilitas penduduk yang kurang dapat membantu usaha pembangunan.
- b. Dalam pembahasan masalah ini hendaknya Delegasi R.I memperhatikan bahwa masalah kependudukan tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan kesatuan masalah yang kait-mengkait dan tidak terlepas dari masalah sosial - budaya dan ekonomi pada umumnya.
Lebih dari itu masalah kependudukan merupakan unsur yang amat Penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara di dunia secara keseluruhan.
- c. Oleh karenanya, Delegasi R.I hendaknya dapat meyakinkan sidang bahwa program kependudukan harus merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program pemerintah negara-negara dunia terutama dalam program pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan, mengingat hubungan erat dan kait-mengkait unsur kependudukan dengan unsur lainya didalam proses pembangunan.
- d. Didalam masalah ini, sekalipun pemerintah indonesia Pada dasarnya berpendapat bahwa tanggungjawab Utama dalam penanggulangan masalah-masalah tersebut diatas pada hakekatnya terletak pada masing-masing negara, namun delegasi R.I hendaknya terus memperjuangkan diperolehnya bantuan-bantuan luar negeri, baik dari sumber bilateral maupun sumber multilateral sebagai pelengkap dari usaha menanggulangi usaha kependudukan di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. MASALAH PERUBAHAN JUMLAH PENDUDUK DAN PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (Population change and economic and Social development).

a. Kecenderungan demografis (demographic trend) ditentukan oleh tingkat perkembangan ekonomi dan sosial. Sebaliknya perkembangan demografis juga mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial pada tingkat nasional dan sektoral.

b. Sehubungan dengan itu kebijaksanaan dan program didalam masalah kependudukan harus merupakan bagian internal dari proses pembangunan sebagai suatu totalitas.

Didalam bidang ini pula kerjasama yang baik diantara pemerintah negara-negara didunia akan memberi arti dan manfaat yang besar sekali nilainya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

3. MASALAH KEPENDUDUKAN, DAN SUMBER-SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN (Population, natural resources and the environment).

a. Antara masalah penduduk, sumber-sumber alam dan lingkungan terdapat hubungan kait-mengkait yang sangat erat. Bagi pemerintah Indonesia, masalah penanggulangan kependudukan merupakan suatu masalah yang sangat menentukan bagi sukses/tidaknya pembangunan yang waktu ini tengah dilaksanakan.

b. Bertambah gawatnya masalah kependudukan di Indonesia tidak hanya dapat diatasi dengan kegiatan keluarga berencana untuk membatasi tingkat kelahiran, tetapi perlu dibarengi dengan adanya keseimbangan kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang transmigrasi, pertanian, industrialisasi, pendidikan, kesehatan serta lingkungan dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. MASALAH KEPENDUDUKAN DAN (HUBUNGANNYA DENGAN) KELUARGA (Population and the family).

Dalam menanggapi masalah ini hendaknya delegasi Republik Indonesia memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program kependudukan pada hakekatnya bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dimana sebagai unit dasar dari pada masyarakat merupakan sasaran dan fakta yang menentukan bagi suksesnya program tersebut sebagai adaptive unit dan agent of change.
- b. Didalam pembangunan Indonesia program kependudukan tidak saja hanya memperhatikan aspek-aspek kuantitatif tetapi juga aspek-aspek kualitatif antara lain kesehatan, kedudukan wanita, pendidikan dan sebagainya.

5. MASALAH RENCANA KEGIATAN DIBIDANG KEPENDUDUKAN (World population plan and action).

- a. Rencana kegiatan dibidang kependudukan dunia merupakan kerangka bagi kerjasama nasional dan internasional dibidang kependudukan mengingat eratnya kaitan antara masalah kependudukan dan pembangunan pada umumnya.
- b. Tujuan Utama dari Rencana Kegiatan Kependudukan Dunia adalah memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan dan menggugah keadilan masyarakat Internasional untuk membantu usaha tersebut, dengan memberikan bantuannya melalui suatu program kerjasama internasional dibidang kependudukan.
- c. Delegasi Republik Indonesia hendaknya memperjuangkan agar Rencana tersebut cukup luwes (flexible) untuk menampung kondisi kependudukan yang berbeda-beda, tetapi cukup tegas dan terarah sehingga dapat mengamankan program



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

kependudukan Indonesia yang ditandai oleh masalah-masalah pokok yang disebut dalam Nomor 1 tersebut di atas.

- d. selanjutnya dalam membahas masalah ini hendaknya Delegasi Republik Indonesia juga memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai dalam "Pre-World Population Conference Regional Consultation", yang diadakan dalam rangka ECAFE, tanggal 7 - 10 Mei 1974, yang merupakan posisi negara-negara Asia mengenai masalah kependudukan.

6. MASALAH PERWAKILAN REPUBLIK KHMER DAN PEMERINTAH REVOLUSIONER VIETNAM SELATAN.

- a. Apabila timbul masalah mengenai credentials Delegasi Republik Khmer, maka Delegasi Republik Indonesia sesuai dengan sikap Indonesia di sidang Majelis Umum PBB yang baru lalu agar tetap menyokong Delegasi Republik Khmer.
- b. Jika masalah partisipasi Pemerintah Revolusioner Vietnam selatan dipersoalkan dan diadakan pemungutan suara, Delegasi Republik Indonesia hendaknya memberikan suara "abstain", dan hendaknya berpedoman pada Resolusi Ecosoc 1835.

III. HAL-HAL LAIN.

1. Delegasi Republik Indonesia hendaknya dapat ikut serta secara aktif dalam setiap Komite dan Group Kerja yang dibentuk selama Konperensi.
2. Delegasi Republik Indonesia hendaknya memberikan suaranya kepada calon-Calon yang telah didukung oleh kelompok-kelompok regional masing-masing. Bila ternyata tidak dicapai persetujuan dalam masing-masing kelompok regional tersebut, delegasi Republik Indonesia diberi keleluasaan untuk Tetap memutuskan sendiri dengan memilih Delegasi-delegasi yang sejalan pandangan politiknya dengan Delegasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Republik Indonesia atau atas azas timbal balik bagi pencalonan Republik Indonesia, sebagai Vice President Conference.

3. Delegasi Republik Indonesia hendaknya mengusahakan kerjasama serta saling pengertian yang sebaik mungkin diantara negara-negara sesama anggota ASEAN, dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam Konperensi.
4. Persoalan-persoalan lain yang belum disebutkan dalam Pedoman ini dan tidak bersifat substansil, pemecahan diserahkan kepada kebijaksanaan ketua delegasi Republik Indonesia dan bila perlu dapat dimintakan Instruksi dari Pemerintah Indonesia oleh ketua Delegasi Republik Indonesia.

Jakarta, 16 Agustus 1974.